



---

## **Kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap Pengurangan Ketimpangan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Analisis SDGs Goal 10 (*Reducing Inequalities*)**

---

---

### **INFO PENULIS**

Khulfi M. Khalwani  
Universitas Pertahanan RI  
[khulfi.khalwani@doktoral.idu.ac.id](mailto:khulfi.khalwani@doktoral.idu.ac.id)  
+6282154744540

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Khalwani, K. M. (2025). Kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap Pengurangan Ketimpangan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Analisis SDGs Goal 10 (*Reducing Inequalities*). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5504-5517

### **Abstrak**

Program Perhutanan Sosial di Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Goal 10 (*Reducing Inequalities*) masih jarang dievaluasi secara sistematis. Penelitian ini mengevaluasi peran Program Perhutanan Sosial dalam pengurangan ketimpangan di Indonesia melalui tinjauan literatur terhadap 82 artikel ilmiah terbitan tahun 2025 dan analisis deskriptif data koefisien Gini menurut provinsi dari Badan Pusat Statistik. Temuan literatur disintesis secara tematik dan dikaitkan dengan indikator SDGs Goal 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan intrawilayah melalui peningkatan pendapatan, diversifikasi penghidupan, penguatan akses sumber daya produktif, dan inklusi sosial kelompok rentan. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan antardaerah dan indikator makro seperti koefisien Gini nasional masih terbatas dan tidak langsung. Penelitian ini menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan instrumen komplementer yang efektif pada skala lokal dalam agenda pengurangan ketimpangan, sekaligus berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial sebagai bagian dari mitigasi ancaman non-militer, tetapi memerlukan integrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah dan perlindungan sosial untuk menghasilkan dampak nasional yang lebih luas.

**Kata kunci:**Perhutanan Sosial, ketimpangan pendapatan, Rasio Gini, SDGs Tujuan 10, Pembangunan Pedesaan.

### Abstract

The Social Forestry Program in Indonesia aims to improve the welfare of communities around forests while supporting sustainable natural resource management. However, its contribution to the achievement of SDGs Goal 10 (Reducing Inequalities) is still rarely evaluated systematically. This study evaluates the role of the Social Forestry Program in reducing inequality in Indonesia through a literature review of 82 scientific articles published in 2025 and a descriptive analysis of Gini coefficient data by province from the Central Statistics Agency. The literature findings are synthesized thematically and associated with the SDGs Goal 10 indicators. The results of the study show that Social Forestry contributes significantly to reducing intra-regional inequality through increasing income, diversifying livelihoods, strengthening access to productive resources, and social inclusion of vulnerable groups. However, its impact on interregional inequality and macro indicators such as the national Gini coefficient is still limited and indirect. This research confirms that Social Forestry is an effective complementary instrument at the local scale in the inequality reduction agenda, while contributing to strengthening social resilience as part of non-military threat mitigation, but requires integration with regional development and social protection policies to produce broader national impacts.

**Key Words:** Social Forestry, Income Inequality, Gini Ratio, SDGs Goal 10, Rural Development.

### A. Pendahuluan

Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam kajian keamanan kontemporer dipahami sebagai bentuk kerentanan non-militer yang berpotensi melemahkan stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan. Perluasan konsep keamanan yang dikemukakan oleh Buzan & Hansen (2009) menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya bersumber dari aspek militer, tetapi juga dari ketimpangan struktural yang menggerus kohesi sosial dan legitimasi pembangunan. Perspektif keamanan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (1994) menempatkan kemiskinan dan ketimpangan sebagai ancaman langsung terhadap kesejahteraan individu, khususnya di negara berkembang dengan ketimpangan spasial yang kuat antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan berbasis sumber daya alam.

*Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 10* secara eksplisit menekankan perlunya intervensi kebijakan yang sistematis untuk menurunkan kesenjangan intra dan antardaerah, antarkelompok sosial, serta antarwilayah melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Laporan ketimpangan global menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya produktif. Ketimpangan tersebut cenderung lebih menonjol di wilayah perdesaan dan kawasan berbasis sumber daya alam, yang secara struktural memiliki keterbatasan dalam akses ekonomi dan sosial (Chancel et al., 2025).

Di Indonesia, dinamika ketimpangan tercermin dari variasi koefisien Gini antarprovinsi dan antardaerah, yang mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan nasional belum terdistribusi secara merata. Wilayah perdesaan dan kawasan hutan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, permodalan, teknologi, serta jaringan pasar, yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor kehutanan cenderung bersifat persisten dibandingkan wilayah non-hutan, sehingga menuntut adanya kebijakan afirmatif yang kontekstual dan berbasis karakteristik wilayah.

Dalam kerangka tersebut, Program Perhutanan Sosial dikembangkan sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas akses kelola hutan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Program ini mencakup berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Rakyat, yang dirancang untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu dan sistem

agroforestri (Abbas et al., 2025; Agnur et al., 2025; Hakim et al., 2025; Mustamu & Kewilaa, 2025).

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial juga memiliki implikasi penting terhadap aspek sosial pembangunan. Program ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat adat, peningkatan partisipasi kelompok tani hutan, serta penguatan peran gender dalam pengelolaan sumber daya hutan (Apriani et al., 2025; Andriyani & Irfan, 2025; Hole & Mayarni, 2025). Penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan lokal dan modal sosial, yang berfungsi sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bimantara et al., 2025; Gumilar et al., 2025; Wulandari & Kusuma, 2025).

Meskipun demikian, kajian mengenai kontribusi Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada dampak pada skala mikro, seperti peningkatan pendapatan atau produktivitas kelompok tani hutan, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan indikator ketimpangan yang digunakan dalam kerangka SDGs, seperti koefisien Gini, proporsi penduduk berpendapatan rendah, maupun kesenjangan antardaerah. Selain itu, literatur juga menunjukkan adanya variasi capaian Perhutanan Sosial antarwilayah yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi sosial-ekonomi awal masyarakat setempat (Hadianti et al., 2025; Nasution et al., 2025; Priyanti et al., 2025).

Kesenjangan antara tujuan normatif Perhutanan Sosial dan bukti empiris mengenai kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan menegaskan perlunya kajian sintesis yang lebih komprehensif. Pendekatan tinjauan literatur memungkinkan integrasi temuan-temuan empiris yang tersebar untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai peran Perhutanan Sosial dalam mendukung pembangunan inklusif. Selain itu, pengaitan hasil kajian literatur dengan indikator ketimpangan makro, seperti koefisien Gini, menjadi penting untuk menilai relevansi dan kontribusi Perhutanan Sosial dalam kerangka pencapaian SDGs Goal 10 secara lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 di Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 82 artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2025, serta analisis data ketimpangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan laporan ketimpangan global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus mengenai Perhutanan Sosial dan pembangunan inklusif, sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengurangan ketimpangan di Indonesia.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur (*literature review*) yang diperkaya oleh analisis konteks kuantitatif makro (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 (*Reducing Inequalities*) di Indonesia melalui sintesis temuan empiris dan analisis kebijakan.

Sumber data utama penelitian ini terdiri atas 82 artikel ilmiah mengenai Perhutanan Sosial yang seluruhnya terbit pada tahun 2025 dan relevan dengan dimensi kesejahteraan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Literatur pendukung meliputi *World Inequality Report 2026* sebagai kerangka pembandingan global serta referensi memanfaatkan data koefisien Gini menurut provinsi dan daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai konteks empiris untuk menggambarkan dinamika ketimpangan di Indonesia.

Seleksi literatur dilakukan secara purposif dengan kriteria sebagai berikut: (1) membahas Perhutanan Sosial atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia; (2) memuat aspek sosial-ekonomi atau kesejahteraan masyarakat; (3) diterbitkan pada tahun 2025; dan (4) memiliki relevansi dengan indikator SDGs Goal 10. Artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, literatur diklasifikasikan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kontribusi Perhutanan Sosial terhadap peningkatan pendapatan, diversifikasi penghidupan, penguatan kelembagaan, dan inklusi sosial. Kedua, temuan empiris disintesis secara komparatif untuk menilai kesesuaiannya dengan indikator-indikator SDGs Goal 10. Ketiga, hasil sintesis literatur dianalisis secara kontekstual dengan

menggunakan data koefisien Gini BPS guna menempatkan temuan pada tingkat mikro dalam kerangka ketimpangan nasional dan regional.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk mengevaluasi kontribusi konseptual dan empiris Program Perhutanan Sosial terhadap upaya pengurangan ketimpangan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis kuantitatif digunakan secara terbatas sebagai konteks pendukung, bukan sebagai dasar inferensi statistik.

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis terhadap 82 artikel ilmiah Perhutanan Sosial yang terbit pada tahun 2025, penelitian ini mengelompokkan temuan-temuan utama ke dalam beberapa klaster tematik. Klaster tersebut kemudian dipetakan terhadap indikator SDGs Goal 10 untuk mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap upaya pengurangan kesenjangan di Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap Indikator SDGs Goal 10

| <b>Klaster Tematik<br/>Temuan Literatur</b>                                    | <b>Bentuk Kontribusi<br/>Perhutanan Sosial</b>                              | <b>Indikator<br/>SDGs Goal<br/>10 Terkait</b> | <b>Implikasi terhadap<br/>Pengurangan<br/>Kesenjangan</b>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan</b>            | Kenaikan pendapatan dari HHBK, agroforestri, ekowisata, dan usaha KUPS      | 10.1.1 (Koefisien Gini), 10.2.1               | Mengurangi kesenjangan intrawilayah antara masyarakat sekitar hutan dan non-hutan |
| <b>Diversifikasi sumber penghidupan</b>                                        | Peralihan dari ketergantungan tunggal ke multi-sumber nafkah berbasis hutan | 10.1.1, 10.2.1                                | Memperkuat ketahanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah                        |
| <b>Pemberdayaan kelompok rentan (petani kecil, perempuan, masyarakat adat)</b> | Peningkatan akses kelola, partisipasi, dan penguatan peran sosial           | 10.2.1, 10.3.1                                | Mendorong inklusi sosial dan pengurangan eksklusi struktural                      |
| <b>Penguatan kelembagaan lokal (KTH, KUPS, hutan adat)</b>                     | Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, dan posisi tawar ekonomi     | 10.3.1, 10.4.1                                | Mengurangi ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya                 |
| <b>Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya hutan</b>                   | Tumbuhnya usaha lokal dan ekonomi desa berbasis Perhutanan Sosial           | 10.1.1, 10.b.1                                | Mendorong pemerataan manfaat pembangunan di wilayah perdesaan                     |
| <b>Akses terhadap sumber daya produktif</b>                                    | Legalitas akses lahan dan kepastian usaha masyarakat hutan                  | 10.2.1                                        | Mengurangi kesenjangan struktural akibat keterbatasan akses aset                  |
| <b>Kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan lokal</b>                        | Penurunan kerentanan ekonomi rumah tangga di sekitar kawasan hutan          | 10.1.1(a), 10.1.1(f)                          | Mendukung penurunan kesenjangan berbasis wilayah tertinggal                       |
| <b>Variasi capaian antarwilayah</b>                                            | Perbedaan hasil akibat kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan lokal   | 10.1.1, 10.1.1(e)                             | Menunjukkan keterbatasan kontribusi terhadap kesenjangan antardaerah              |
| <b>Integrasi sosial-ekologis</b>                                               | Pengelolaan hutan lestari yang menopang stabilitas ekonomi jangka panjang   | 10.2.1                                        | Memperkuat keberlanjutan manfaat ekonomi bagi kelompok bawah                      |
| <b>Keterbatasan dampak makro</b>                                               | Dampak terhadap Gini Ratio nasional masih bersifat tidak langsung           | 10.1.1                                        | Menegaskan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pelengkap kebijakan makro          |

Sumber: Analisis Literatur

### **1. Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pengurangan Ketimpangan Intrawilayah**

Sintesis terhadap 82 artikel ilmiah Perhutanan Sosial yang terbit pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi paling konsisten dari program ini terhadap pencapaian SDGs Goal 10 terletak pada pengurangan ketimpangan intrawilayah, khususnya di kawasan perdesaan dan sekitar hutan. Mayoritas studi melaporkan peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestri, pengolahan komoditas lokal, serta penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Abbas et al., 2025; Hakim et al., 2025; Winanto et al., 2025; Witno et al., 2025).

Temuan ini selaras dengan literatur internasional yang menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya produktif merupakan determinan utama ketimpangan ekonomi (Chancel et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, Perhutanan Sosial bekerja sebagai mekanisme redistribusi akses, bukan redistribusi pendapatan secara langsung. Dengan memberikan kepastian akses kelola hutan, program ini memungkinkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah meningkatkan posisi ekonomi relatifnya di tingkat lokal, meskipun dampaknya terhadap koefisien Gini nasional bersifat tidak langsung dan gradual.

Data Gini Ratio provinsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih relatif tinggi, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial berperan sebagai instrumen korektif di tingkat mikro yang melengkapi kebijakan makro pengurangan ketimpangan (BPS, 2025).

### **2. Diversifikasi Penghidupan dan Ketahanan Sosial-Ekologis**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial secara sistematis mendorong diversifikasi sumber penghidupan, yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat hutan. Berbagai studi menunjukkan peralihan dari ketergantungan tunggal pada pertanian subsisten menuju kombinasi agroforestri, HHBK, peternakan lebah madu, ekowisata, dan usaha olahan hasil hutan (Astaman et al., 2025; Ibrahim et al., 2025; Sahureka et al., 2025).

Dari perspektif teori resiliensi sosial-ekologis, diversifikasi penghidupan meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi dan lingkungan (Folke, 2006; Behboudian et al., 2025). Dengan demikian, kontribusi Perhutanan Sosial terhadap SDGs Goal 10 tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural, karena mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap ketimpangan jangka panjang.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada kualitas pendampingan, akses pasar, dan dukungan kebijakan lokal. Tanpa faktor-faktor tersebut, manfaat ekonomi Perhutanan Sosial cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan berpotensi menciptakan ketimpangan internal baru (Kahsay et al., 2023; Sahide et al., 2020).

### **3. Pemberdayaan Sosial, Inklusi Gender, dan Masyarakat Adat**

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan struktural. Sejumlah studi menegaskan bahwa pengakuan akses kelola hutan memperkuat posisi sosial masyarakat adat dan mengurangi konflik agraria yang selama ini menjadi sumber eksklusi dan ketimpangan (Andriyani & Irfan, 2025; Halomoan et al., 2025).

Aspek gender juga menjadi temuan penting dalam literatur 2025. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya dalam usaha HHBK dan pengolahan hasil hutan, berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus memperluas partisipasi sosial (Apriani et al., 2025; Rustham et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa Perhutanan Sosial mendukung indikator SDGs 10.2.1 dan 10.3.1, yakni peningkatan inklusi sosial dan pengurangan diskriminasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, penguatan inklusi sosial melalui Perhutanan Sosial sejalan dengan pendekatan human security, yang menempatkan kesejahteraan, akses sumber daya, dan keadilan sosial sebagai bagian dari keamanan manusia (UNDP, 1994; Caballero-Anthony, 2016).

### **4. Kelembagaan Lokal, Tata Kelola, dan Relasi Kuasa**

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan lokal merupakan faktor penentu dalam distribusi manfaat Perhutanan Sosial. Kelompok tani hutan dan KUPS dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel cenderung menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi anggotanya (Bimantara et al., 2025; Kahsay et al., 2023).

Sebaliknya, kelembagaan yang lemah berisiko mereproduksi ketimpangan internal, baik dalam pengambilan keputusan maupun distribusi keuntungan. Temuan ini konsisten dengan kritik kebijakan Perhutanan Sosial yang menyoroti adanya kecenderungan policy layering tanpa transformasi struktural yang mendalam (Erbaugh, 2019; Erbaugh & Nurrochmat, 2019).

Dalam konteks SDGs Goal 10, penguatan kelembagaan lokal berkontribusi pada pengurangan ketimpangan relasi kuasa, tetapi membutuhkan integrasi dengan reformasi tenurial dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat (Myers et al., 2022; Siscawati et al., 2017).

## 5. Dampak Struktural Perhutanan Sosial terhadap Ketimpangan Spasial dan Pencapaian SDGs 10

Literatur menunjukkan bahwa meskipun Program Perhutanan Sosial memberikan dampak yang relatif kuat terhadap pengurangan ketimpangan di dalam wilayah (intra wilayah), khususnya di tingkat desa dan komunitas sekitar hutan, kontribusinya terhadap penurunan ketimpangan antardaerah dan nasional masih bersifat terbatas. Capaian program sangat bervariasi antarprovinsi dan dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, dukungan kebijakan lintas sektor, serta kondisi sosial-ekonomi awal masyarakat penerima manfaat (Nasution et al., 2025; Nurwansyah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan studi lintas wilayah yang menegaskan bahwa dampak Perhutanan Sosial terhadap kesejahteraan dan konservasi bersifat heterogen, sehingga program ini tidak dapat diposisikan sebagai instrumen tunggal untuk menurunkan ketimpangan nasional secara langsung (Santika et al., 2019).

Dalam konteks tersebut, perbandingan Gini Ratio Indonesia antara tahun 2015 dan 2025 menjadi relevan karena tahun 2015 menandai fase awal penguatan dan perluasan kebijakan Perhutanan Sosial secara nasional. Sejak periode tersebut, Perhutanan Sosial mulai digaungkan sebagai strategi korektif untuk menjawab ketimpangan akses kelola sumber daya hutan, konflik agraria, serta keterbatasan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Rentang waktu satu dekade ini merepresentasikan fase implementasi kebijakan yang cukup panjang untuk mengamati kecenderungan struktural ketimpangan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan dampak kebijakan secara makro.

Tabel 2. Perbandingan Gini Ratio Indonesia Tahun 2015 dan 2025

| Wilayah   | Gini Ratio 2015 | Gini Ratio 2025 | Perubahan ( $\Delta$ ) |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Nasional  | 0,408           | 0,375           | -0,033                 |
| Perkotaan | 0,428           | 0,395           | -0,033                 |
| Perdesaan | 0,334           | 0,299           | -0,035                 |

Data Gini Ratio menunjukkan bahwa selama periode 2015–2025 terjadi penurunan ketimpangan pendapatan secara nasional, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, meskipun penurunannya berlangsung secara gradual. Namun demikian, ketimpangan di wilayah perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dan kesenjangan spasial antara kota dan desa masih bertahan. Pola ini mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan nasional tidak dapat dijelaskan oleh satu instrumen kebijakan semata, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai intervensi pembangunan, termasuk perlindungan sosial, pembangunan perdesaan, dan reformasi tata kelola sumber daya alam.

Dalam kerangka tersebut, Program Perhutanan Sosial berkontribusi terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan sekitar hutan, yaitu wilayah yang secara historis memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dan kerentanan ketimpangan yang lebih tinggi. Sintesis literatur Perhutanan Sosial tahun 2025 menunjukkan bahwa program ini secara konsisten meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong diversifikasi penghidupan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Dampak-dampak ini berperan penting dalam menekan ketimpangan intra wilayah perdesaan, meskipun belum cukup kuat untuk secara signifikan menggeser indikator ketimpangan makro seperti Gini Ratio nasional.

Perbedaan antara skala dampak mikro dan indikator makro tersebut menegaskan bahwa Perhutanan Sosial bekerja melalui mekanisme jangka menengah hingga panjang. Program ini tidak dirancang sebagai instrumen redistribusi pendapatan langsung, melainkan sebagai kebijakan struktural yang memperluas akses ekonomi dan sosial kelompok rentan. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap penurunan ketimpangan nasional bersifat akumulatif dan sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan, perluasan cakupan wilayah, serta integrasinya dengan kebijakan pembangunan lainnya.

Dengan membaca dinamika Gini Ratio 2015–2025 dalam perspektif kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Program Perhutanan Sosial berperan sebagai instrumen komplementer

dalam agenda pengurangan ketimpangan di Indonesia. Meskipun dampaknya belum sepenuhnya tercermin dalam indikator ketimpangan makro, temuan empiris menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memiliki potensi strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan inklusif di tingkat lokal dan mendukung tren penurunan ketimpangan jangka panjang, khususnya apabila diintegrasikan secara konsisten dengan kebijakan pembangunan wilayah dan perlindungan sosial, sebagaimana direkomendasikan dalam World Inequality Report 2026 (Chancel et al., 2025).

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 (Reducing Inequalities) di Indonesia melalui sintesis literatur terhadap 82 artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2025 serta analisis indikator ketimpangan menggunakan data koefisien Gini dari Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memberikan kontribusi nyata namun bersifat tidak langsung terhadap upaya pengurangan kesenjangan.

Kontribusi paling konsisten dari Program Perhutanan Sosial terletak pada pengurangan ketimpangan intrawilayah, khususnya di kawasan perdesaan dan sekitar hutan. Peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi sumber penghidupan, serta penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif menjadi mekanisme utama yang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial berperan sebagai instrumen redistribusi akses ekonomi dan sosial, yang relevan dengan indikator SDGs 10.1.1 dan 10.2.1.

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan struktural melalui penguatan inklusi sosial, peningkatan peran perempuan, pengakuan hak masyarakat adat, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun demikian, kajian ini menemukan bahwa dampak Perhutanan Sosial terhadap penurunan ketimpangan antardaerah dan koefisien Gini nasional masih terbatas. Variasi capaian antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal, dukungan kebijakan daerah, serta integrasi dengan program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, Program Perhutanan Sosial tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal untuk mengatasi ketimpangan nasional, tetapi sebagai instrumen komplementer yang berperan penting dalam memperkuat pembangunan inklusif di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi indikator SDGs Goal 10 dalam evaluasi Perhutanan Sosial  
Kementerian Kehutanan perlu mengintegrasikan indikator ketimpangan, seperti Gini Ratio regional dan indikator inklusi sosial, dalam sistem monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial agar kontribusinya terhadap pengurangan kesenjangan dapat diukur secara lebih sistematis.
2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola kelompok Perhutanan Sosial  
Penguatan kapasitas organisasi, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas kelembagaan kelompok tani hutan dan KUPS perlu menjadi prioritas untuk mencegah ketimpangan internal dan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil.
3. Peningkatan dukungan ekonomi dan akses pasar  
Diversifikasi penghidupan masyarakat hutan perlu didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan rantai nilai agar manfaat ekonomi Perhutanan Sosial tidak berhenti pada skala subsisten.
4. Pendekatan afirmatif bagi kelompok rentan  
Kebijakan Perhutanan Sosial perlu secara eksplisit memasukkan strategi afirmatif bagi perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin agar kontribusinya terhadap inklusi sosial dan pengurangan diskriminasi semakin kuat.
5. Sinergi lintas sektor dan pembangunan wilayah  
Untuk memperkuat dampak terhadap ketimpangan antardaerah, Perhutanan Sosial harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah, perlindungan sosial, dan pengurangan kemiskinan secara terintegrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara Perhutanan Sosial dan SDGs Goal 10 melalui pendekatan sintesis literatur dan analisis indikator ketimpangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan

pendekatan kuantitatif atau mixed methods yang mengombinasikan data implementasi Perhutanan Sosial dengan indikator ketimpangan regional secara longitudinal, sehingga hubungan kausal dapat dianalisis lebih mendalam.

## E. Referensi

- Abbas, D., Salim, T., Putri, W. F., & Julham, M. (2025). Pengelolaan usaha lebah madu *Trigona* sp. oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tugurara, Kelurahan Tubo, Kota Ternate. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 18(2), 291–302. <https://journal.tyarlyta.com/index.php/agrikan/article/view/2624>
- Abdullah, A., & Ridwan. (2025). Strategi penghidupan petani kopi Kelompok Tani Hutan Makabori di Hutan Kemasyarakatan Paladingan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 163–177. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2456>
- Agnur, Y. A., Ariandi, R., & Muthmainnah. (2025). Analisis pendapatan masyarakat pada kawasan hutan lindung di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. *Forest Services (FORCES) Journal*, 3(1), 38–49. <https://doi.org/10.62142/9e8w6f25>
- Ahlan, A. F., Setiawan, B., & Fahrussiam, F. (2025). Analisis tingkat produktivitas dan pendapatan penyadap getah pinus di Resort Pemangkuan Hutan Karangharjo Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Selatan. *Agrica: Journal of Sustainable Dryland Agriculture*, 18(2), 192–208. <https://doi.org/10.37478/agr.v18i2.5839>
- Ahmad, N., Sholikhah, F., Bashiroh, A., Bahauddin, M. A., Anita, & Wahyudi, R. (2025). Penguatan ketahanan lingkungan dan pemberdayaan petani berbasis kearifan lokal di LMDH Wana Mitra Sejahtera Lestari, Lebak Jabung. *Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 225–236. <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah/article/view/277>
- Akhir, J., Rizaka, F. W., Dahlan, Arlita, T., & Basri, H. (2025). Peran agroforestri kopi Arabika dalam penyerapan karbon di perhutanan sosial Desa Kekuyang, Aceh Tengah. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 16(3), 208–217. <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.16.03.208-217>
- Aliman, Y. Z. J. A., Kaho, L. M. R., Pramata, F., & Seran, W. (2025). Faktor penyebab dan peran stakeholder terhadap permasalahan perambahan di kawasan hutan produksi Manus Mbengan RTK 110 di Kabupaten Manggarai Timur. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 20(1), 58–70. <https://doi.org/10.31849/forestra.v20i1.22947>
- Ananta, S. F., Puteri, J. S. B., Syaharani, S. D., Sinaga, O. C. O. H., Listanti, R. F., & Setyadi, T. (2025). Pemberdayaan masyarakat desa hutan binaan Perum Perhutani KPH Mojokerto melalui sosialisasi usaha produktif pengolahan ampas tebu menjadi kerupuk. *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 252–263. [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v5i1.4407](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4407)
- Andriyani, S., & Irfan, M. (2025). Peran negara dalam perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Private Law*, 5(3), 971–981. <https://doi.org/10.29303/e6pzrd08>
- Annisa, & Syafril, R. (2025). Efektivitas pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Kopi Bantjah di Kelurahan Limau Manis Selatan. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 345–354. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5356/4578>
- Apriadi, Susilowati, L. E., Mulyati, & Suwardji. (2025). Integrasi pertanian dan kehutanan dalam kerangka agroekologi: Strategi pengendalian deforestasi melalui agroforestri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek*, 4(3), 841–849. <https://doi.org/10.29303/4sfeba38>
- Apriani, A. A., Marwoto, & Syarifuddin, H. (2025). Peran gender dalam pengelolaan perhutanan sosial skema HKm dan HTR di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 21–30. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5677>
- Aprisya, R., & Elida, S. (2025). Kontribusi usaha ternak lebah madu terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Dinamika Agribisnis*, 1(1), 67–79. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdagri/article/view/25746>
- Asasandi, I. G. N. A., & Yusuf, M. (2025). Model peningkatan pengetahuan dan pendapatan melalui agrowisata kopi di Desa Sapit Lombok Timur NTB. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 4(2), 128–134. <https://journal.literasisains.id/index.php/toba/article/view/5303>
- Astaman, P., Hikmah, A. N., Dassir, M., Nadirah, S., & Darwis, M. (2025). Livelihood petani dan perhutanan sosial: Analisis karakteristik sosial-ekonomi untuk pengelolaan hutan lestari. *Agriculture and Socio-Economic Journal*, 2(1), 28–41. <https://agrisosco.com/index.php/ASEJ/article/view/104>



- Azis, A., & Islam, R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan melalui penerapan teknologi geospasial di Desa Jeruk Manis, Lombok Timur. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(4), 98–102. <https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i4.248>
- Aziz, F., & Tresiana, N. (2025). Perbandingan pembangunan berkelanjutan antara skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7(3), 304–324. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v7i3.343>
- Batubara, R., Dalimunte, A., Hannum, S., & Affandi, O. (2025). Edukasi rehabilitasi hutan mangrove pasca illegal logging dan pemberdayaan kelompok tani hutan di Lubuk Kertang, Sumatera Utara. *Abdi Dharma*, 5(1), 119–126. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ad/article/view/3544>
- Behboudian, R., Meyfroidt, P., Larson, A. M., & Horcea-Milcu, A. I. (2025). Social resilience of tropical forest ecosystems: A systematic review. *Journal of Environmental Management*, 378, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127319>
- Bimantara, T., Samsu, A. K. A., & Hasanuddin. (2025). Analisis tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Toraja Utara. *Eboni: Jurnal Ilmiah Kehutanan*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.46918/eboni.v7i1.2708>
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press. <https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/buzan-the-evolution-of-international-security-studies-compressed.pdf>
- Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshrif, R., Piketty, T., et al. (2025). *World Inequality Report 2026*. World Inequality Lab.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches + a crash course in statistics*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (p. 304). Sage Publications, Inc.
- Dako, F. X., Lamanda, S. A., Selanno, F. M., Ora, Y. A. N. R., Rusadi, N., Gare, K. F. S., Paga, B., & Adrin. (2025). Struktur komunitas dan keanekaragaman vegetasi dalam skema perhutanan sosial: Studi kasus Kelompok Tani Hutan Fetomnasi di Desa Sillu, Nusa Tenggara Timur. *Partner (Edisi Khusus)*, 30(3), 349–362. <http://dx.doi.org/10.35726/jp.v30i3.7514>
- Dalby, S. (2013). Climate Change. *The RUSI Journal*, 158(3), 34–43. <https://doi.org/10.1080/03071847.2013.807583>
- Darmawan, L. S., Sarkawi, & Fallahiyan, M. A. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Bayan. *Jurnal Diskresi*, 4(2), 362–375. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/en/article/view/7725>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Erbaugh, J. T., & Nurrochmat, D. R. (2019). Paradigm shift and business as usual through policy layering: Forest-related policy change in Indonesia (1999-2016). *Land Use Policy*, 86, 136–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.021>
- Fadhliana, D., & Hidayatullah, M. R. (2025). Social forestry program implementation under corporate social and environmental responsibility: A case study of PT Pertamina Patra Niaga AFT BIL. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 75–87. <https://doi.org/10.55381/jpm.v4i2.492>
- Fikri, M. G., Markum, & Setiawan, B. (2025). Evaluasi kinerja hutan kemasyarakatan Merte Sari Desa Sengigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *GeoScienceEd: Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika*, 6(1), 19–27. <https://eprints.unram.ac.id/50297/>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Gumilar, E., Adhya, I., & Nurlaila, A. (2025). Resiliensi dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Studi kasus: Kelompok Tani Hutan Putra Manglayang). *Journal of Forestry and Environment*, 8(1), 22–41. <https://doi.org/10.25134/jgg0w325>
- Gunawan, H., Kartodihardjo, H., Achmad, A., & Ichwandi, I. (2022). Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 2152. <https://www.mdpi.com/1999-4907/13/12/2152>
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih, R., Pratiwi, Sumirat, B. K., Sawitri, R., Heriyanto, N. M., Takandjandji, M., Widarti, A., Surati, Desmiwati, Kalima, T., Effendi, R., ... Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry

- and Biodiversity Conservation in Indonesia. In *Forests* (Vol. 13, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Gunawarman, A. A. G. R., Warmadewi, A. A. I. M., & Murti, A. A. G. K. (2025). Penguatan pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis bambu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat: Studi kasus KTH Wana Kerta Lestari, Tabanan, Bali. *Jurnal Lentera Karya Edukasi*, 5(3), 117–126. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/89832>
- Hadianti, M., Hafiziannor, & Naparin, M. (2025). Strategi sustainable livelihoods masyarakat sekitar hutan pemegang izin perhutanan sosial di KPH Tanah Laut. *Jurnal Hutan Tropis*, 13(2), 225–238. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i2.23037>
- Hadjar, N., Pujirahayu, N., Basrudin, Hamzah, N., Sakti, A., Kabe, A., & Putri, S. I. (2025). Transformasi inovasi pengolahan aren sebagai solusi peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus Universitas Halu Oleo. *Jurnal Pengabdian EcoForest*, 3(1), 25–34. <https://ecoforest.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/65>
- Hakim, J., Azizah, N. H. S., & Putri, W. F. (2025). Analisis pendapatan usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) Majojo Kelurahan Tuguwaji, Kota Tidore Kepulauan. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 18(1), 176–184. <https://journal.tyarlyta.com/index.php/agrikan/article/view/2517>
- Halomoan, M. R., Dharmawan, A. H., & Sunito, S. (2025). Social Forestry as Solution to Agrarian Conflicts? A Case Study between Oil Palm Smallholders and Industrial Plantations in Jambi, Indonesia. *Forest and Society*, 9(2), 449–470. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.26656>
- Hartono, R. (2025). Dilema legalitas pemanfaatan mangrove untuk industri arang di Desa Batu Ampar, Kalimantan Barat: Kajian sosio-ekologis dan solusi tata kelola hutan berbasis komunitas. *ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 91–97. <https://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/isihumor/article/view/984>
- Hayati, R., & Al-Amin. (2025). Peran strategis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat perbatasan: Analisis literatur atas kontribusi dan tantangan pada pertumbuhan ekonomi regional. *Borjuis: Journal of Economy*, 2(4), 168–177. <https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/231>
- Hidayah, T. N., & Rahman, A. (2025). Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program perhutanan sosial. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 296–302. <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/494>
- Hole, A. D., & Mayarni. (2025). Pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan berbasis masyarakat di Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2134–2145. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18516>
- Ibrahim, R., Asysyifa, & Pujiawati, E. D. (2025). Kontribusi usaha lebah madu terhadap pendapatan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sylva Scientiae*, 8(4), 660–668. <https://doi.org/10.20527/jss.v8i4.9738>
- Imbiri, S. E., Anggai, M., Wahyuti, Medyati, N., Irab, S. P., & Ruru, Y. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber pangan di Kampung Barapasi Distrik Waropen Atas Kabupaten Mamberamo Raya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5090–5102. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17833>
- Iswari, N., Ekayani, M., & Nurrochmat, D. R. (2025). Analisis wacana implementasi program perhutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 12(2), 125–138. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i2.64837>
- Jaya, F., Sucipto, Yati, Kadarisman, Siswanto, R., Wulandari, N. A. T., & Ningrum, S. U. D. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM melalui digital market ecosystem strategy Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Mulyasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3), 923–933. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/26261>
- Kahsay, G. A., Nielsen, Ø. J., & Vedel, S. E. (2023). Leadership accountability in community-based forestmanagement. *Ecology and Society*, 28(4), 20. <https://ecologyandsociety.org/vol28/iss4/art20/>
- Kurniawan, A., Sapsuha, Y., Arif, N., Hadun, R., Rasulu, H., Marasabessy, M. H., & Tamrin, M. (2025). Penguatan kapasitas kelompok pasca izin perhutanan sosial di Kelurahan Foradiahi, Maluku Utara. *Madaniya*, 6(3), 1724–1733. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/1363>

- Lestari, I., Maryani, Allasselcida, A., Agustina, D. T., Sabri, E. T. B., Ikhsani, H., Nugraha, L. A., Mohta, G., & Putra, A. K. (2025). Persepsi stakeholder terhadap fungsi hutan dalam upaya mempertahankan kawasan hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 9(2), 90–98. <https://jiik.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIIK/article/view/125>
- Marwoto, Ulfa, M., & Tamara, I. (2025). Analisis struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras di Desa Demang Kabupaten Sarolangun. *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, 10(1), 111–119. <https://doi.org/10.33087/mea.v10i1.286>
- Mawaddah, & Zulkarnaini. (2025). Evaluasi kebijakan pengendalian deforestasi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 128–136. <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/1007>
- Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia. (2024). The State of Indonesia's Forest 2024 Toward Ecosystem In Indonesia (Vol. 4). Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7807/the-state-of-indonesias-forests-soifo-2024>
- Mustamu, S., & Kewilaa, V. L. N. (2025). Nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu dalam mendukung livelihood berkelanjutan: Studi kasus di Desa Haruku. *Marsegu: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(1), 44–55. <https://doi.org/10.69840/marsegu/1.2.2024.44-55>
- Myers, R., Fisher, M., Monterroso, I., Liswanti, N., Maryudi, A., Larson, A. M., Mwangi, E., & Herawati, T. (2022). Coordinating forest tenure reform: Objectives, resources and relations in Indonesia, Kenya, Nepal, Peru, and Uganda. *Forest Policy and Economics*, 139, 102718. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102718>
- Naibaho, J., Ahyauddin, & Muryunika, R. (2025). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rap Tama Jaya Desa Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. *Sylva: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 14(2), 75–85. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/sylva/article/view/10790>
- Nasution, A. A., Putra, A. H., Fakhruddin, & Malahayati. (2025). Peluang dan tantangan pengembangan perhutanan sosial berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. *Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1243-1249>
- Nita, D. C., Putri, R. E., & Febriani, T. (2025). Dampak alih fungsi lahan hutan menjadi lahan serai wangi terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 238–250. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/32557>
- Nugroho, H. Y. S. H., et al. (2023). A chronicle of Indonesia's forest management: A long step towards environmental sustainability and community welfare. *Land*, 12(6), 1238. <https://www.mdpi.com/2073-445X/12/6/1238>
- Nugroho, H. Y., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. In *Land* (Vol. 12, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Nur, H., Mando, L. O. A. S., Nikoyan, A., Basrudin, Laksananny, S. A., Zulkarnain, & Flamin, A. (2025). Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan pemilihan jenis agroforestri unggulan pada Hutan Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Ecoforest Journal*, 3(1), 13–24. <https://ecoforest.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/63>
- Nurwansyah, N., Kartodihardjo, H., & Ichwandi, I. (2024). Social forestry in West Sumatra: A review on regulation and its implementation in Hutan Nagari Salibutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(2), 153–166. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.13098>
- Oematan, M., Kase, P., Rihi, D. W., & Sayrani, L. P. (2025). Analisis good governance dalam pengelolaan hutan lindung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan di Desa Netpala, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(2), 1–14. <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/3546/3044>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172133>
- Padama, S. N., Mau, A. E., Sinaga, P. S., & Riwu Kaho, N. P. L. B. (2025). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan dampaknya terhadap kondisi hutan di Kelompok HKm Buli Uher, Kabupaten Sikka. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 20(1), 43–57. <https://doi.org/10.31849/forestra.v20i1.22299>

- Peluso, N., & Poffenberger, M. (2008). Social Forestry in Java: Reorienting Management Systems. *Human Organization*, 48(4), 333–344. <https://doi.org/10.17730/humo.48.4.a4r82227p5065638>
- Pertiwi, Y. A. B., Agustina, A., Wicaksono, R. L., Nayasilana, I. N., Masyithoh, G., Rahmadwiati, R., & Murhofiq, S. (2025). Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial di Desa Banyurip, Sragen. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(3), 559–567. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.3.559-567>
- Pietersz, J. H., & Wattimena, C. M. (2025). Potensi ekologis hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam menopang aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat pegunungan. *Marsegu: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.69840/marsegu/2.1.2025.30-43>
- Priyanti, R., Rianawati, F., & Helmi, M. (2025). Analisis keberhasilan dan strategi pengembangan program hutan kemasyarakatan dengan pendekatan analisis TOWS pada KTH Kariya Jaya Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scienteae*, 8(5), 866–875. <https://doi.org/10.20527/jss.v8i5.17163>
- Puspytasari, H. H., Hasyiyati, A. A., Riyanti, M. D., & Noor, E. Z. (2025). Perancangan perjanjian pengelolaan hutan melalui metode sosialisasi di Desa Giri Sekar, Gunung Kidul, DIY. *Jurnal Darma Loka*, 1(2), 75–87. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/darmaloka/article/view/73218>
- Rahayaan, C. T., Parera, E., & Imlabla, W. (2025). Kontribusi pendapatan sopi terhadap pendapatan masyarakat di Negeri Ema, Kota Ambon. *Marsegu: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(4), 248–261. <https://doi.org/10.69840/marsegu/2.4.2025.248-261>
- Ramadhan, R. A., & Purwaningsih, E. (2025). Pola persebaran pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat lokal di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 222–239. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/30940>
- Ramadhan, R., Afiq, M. D., Anggara, A., & Triwanto, J. (2025). Community welfare and forest sustainability in social forestry programs: A case study of KTH Bhakti Alam Lestari in Malang, East Java. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.13-26>
- Ramadhan, R., Afiq, M. D., Anggara, A., & Triwanto, J. (2025). Community Welfare and Forest Sustainability in Social Forestry Programs: a Case Study of Kth Bhakti Alam Lestari in Malang, East Java. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.13-26>
- Ramadhan, R., Riski, A. N., & Chanan, M. (2024). Enhancing Tenure Security: A Case Study of the Social Forestry Scheme in the State Forestry Corporation, Malang District, East Java. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.22146/jik.v18i1.8616>
- Rino, Aryadi, M., & Abidin, Z. (2025). Strategi pengelolaan program perhutanan sosial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sengayam. *Jurnal Hutan Tropis*, 13(1), 12–24. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i1.22176>
- Rustham, A. T. P., Wahyuni, S., Aras, R. A., Susanti, S., Afandi, I. N., Syafei, I., & Sarah, R. A. (2025). Pengaruh pelatihan self awareness dan creative thinking untuk meningkatkan kemampuan branding produk pada kelompok perhutanan sosial Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 6–14. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/abdi/article/view/33866>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Sambawa, W. P. S. H., Ichsan, A. C., & Anwar, H. (2025). Pengelolaan hutan adat berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 1280–1300. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3609>
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Meijaard, E., Law, E. A., Friedman, R., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., St. John, F. A. V., & Struebig, M. J. (2019). Heterogeneous impacts of community forestry on forest conservation and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *People and Nature*, 1(2), 204–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pan3.25>
- Sedik, W., & Triputro, R. W. (2025). Polemik status ganda hutan adat dan hutan desa di Suku Miyah Kabupaten Tambrau. *TheJournalish: Social and Government*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i1.871>



- Seta, K., Zamrodah, Y., Budiman, E. W., & Prayudhi, L. A. (2025). Faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung: Studi kasus perhutanan sosial di Desa Karangbendo. *Grafting: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 15(1), 23–30. <https://doi.org/10.35457/grafting.v15i1.4427>
- Setiawan, A., Arniawati, Qadri, M. S., Surya, R. A., Bana, S., Davik, Zulkarnain, Flamin, A., Erif, L. O. M., & Zainun, M. (2025). Identifikasi praktik pengelolaan lahan agroforestri kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal Kehutanan Indonesia (Celebica)*, 6(2), 288–299. <https://doi.org/10.65078/jc.v6i2.200>
- Seva, T. A., Putra, M. R. A., & Sugiantara, I. G. (2025). Community empowerment through local resource management: A case study of the social forestry scheme in Yehembang Kangin Village. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.55381/ijsrr.v4i2.431>
- Simanjuntak, R., Manik, E., Wangka, N. M., Kaluela, M., & Kotango, A. H. (2025). Pengembangan ekonomi kreatif olahan pala dan pertanian permakultur berbasis perhutanan sosial di Desa Talaga Paca, Kabupaten Halmahera Utara. *Madaniya*, 6(4), 3048–3057. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/1554>
- Sirimorok, N. (2024). Linking commoning with social forestry: An Indonesian case. *Forest Policy and Economics*, 160, 103198. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100737>
- Siscawati, M., Banjade, M. R., Liswanti, N., Herawati, T., Mwangi, E., Tjoa, M., & Silaya, T. (2017). Overview of forest tenure reforms in Indonesia. In CIFOR Working Paper No. 223. <https://doi.org/10.17528/cifor/006402>
- Surnayanti, Tsani, M. K., Harianto, S. P., & Rufaidah, E. (2025). Dampak pengembangan agroforestri terhadap struktur vegetasi tanaman dan pendapatan masyarakat: Studi kasus KTH Serumpun Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal AGRIFOR*, 24(2), 317–328. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v24i2.8436>
- Syafitri, L. D., Putri, S. S., Manumpil, P., Ambarwati, N. H., & Romarina, A. (2025). Mewujudkan pertumbuhan yang merata: Analisis literatur ekonomi pembangunan Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2615–2620. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3839>
- Syofiarti, Fatimah, T., & Aini, N. (2025). Problematik hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468>
- Ulfa, M., Fazriyas, Nurmansyah, R., Ahyauddin, & Maelan, B. (2025). Analisis pendapatan dan motivasi masyarakat dalam kegiatan restorasi ekosistem pola agroforestri di hutan lindung gambut Bram Hitam Provinsi Jambi. *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, 10(2), 145–151. <https://doi.org/10.33087/mea.v10i2.304>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Verawati, Bida, O., & Nurdin, N. H. (2025). Perhutanan sosial sebagai instrumen peningkatan ekonomi lokal: Telaah implementasi di Kabupaten Mamasa. *Journal Publicuho*, 8(3), 1675–1686. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.887>
- Wathoni, L. A. H., Fuady, H., & Arini, G. A. (2025). Analisis dampak pemberdayaan masyarakat petani kopi terhadap tingkat pendapatan petani kopi di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *Ekonobis*, 11(1), 34–44. <https://ekonobis.unram.ac.id/index.php/ekonobis/article/view/213/115>
- Wijaya, R. G., Qurniati, R., Duryat, & Huda, R. (2025). Tingkat kepatuhan terhadap regulasi tanaman berkayu di lahan agroforestri Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*, 13(1), 157–163. <https://semnaskonservasi.lppm.unila.ac.id/index.php/files/article/view/128>
- Winanto, Ansyar, M., & Hermawan, Y. (2025). Kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) terhadap pendapatan petani di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 3(2), 91–98. <https://doi.org/10.55182/jimp.v3i2.589>
- Witno, Maria, Nuryanti, D. M., & Putri, A. U. B. (2025). Diversifikasi nira aren menjadi gula liquid oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Nira Aren Desa Sangtandung. *Abdimas Galuh*, 7(2), 1121–1128. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i2.18511>
- Wulandari, E., & Kusuma, A. F. (2025). Implementasi modal sosial dalam peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.62099/khapro.v6i1.101>

Zarkasyi, A., Markum, & Wulandari, F. T. (2025). Analysis of the level of farmers' welfare in the Sekaroh Jaya community forest, East Lombok Regency. *Jurnal Biologi Tropis*, 25(3), 3073–3082. <https://doi.org/10.29303/jbt.v25i3.9663>